

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : / SK/GUB /2025
TANGGAL :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

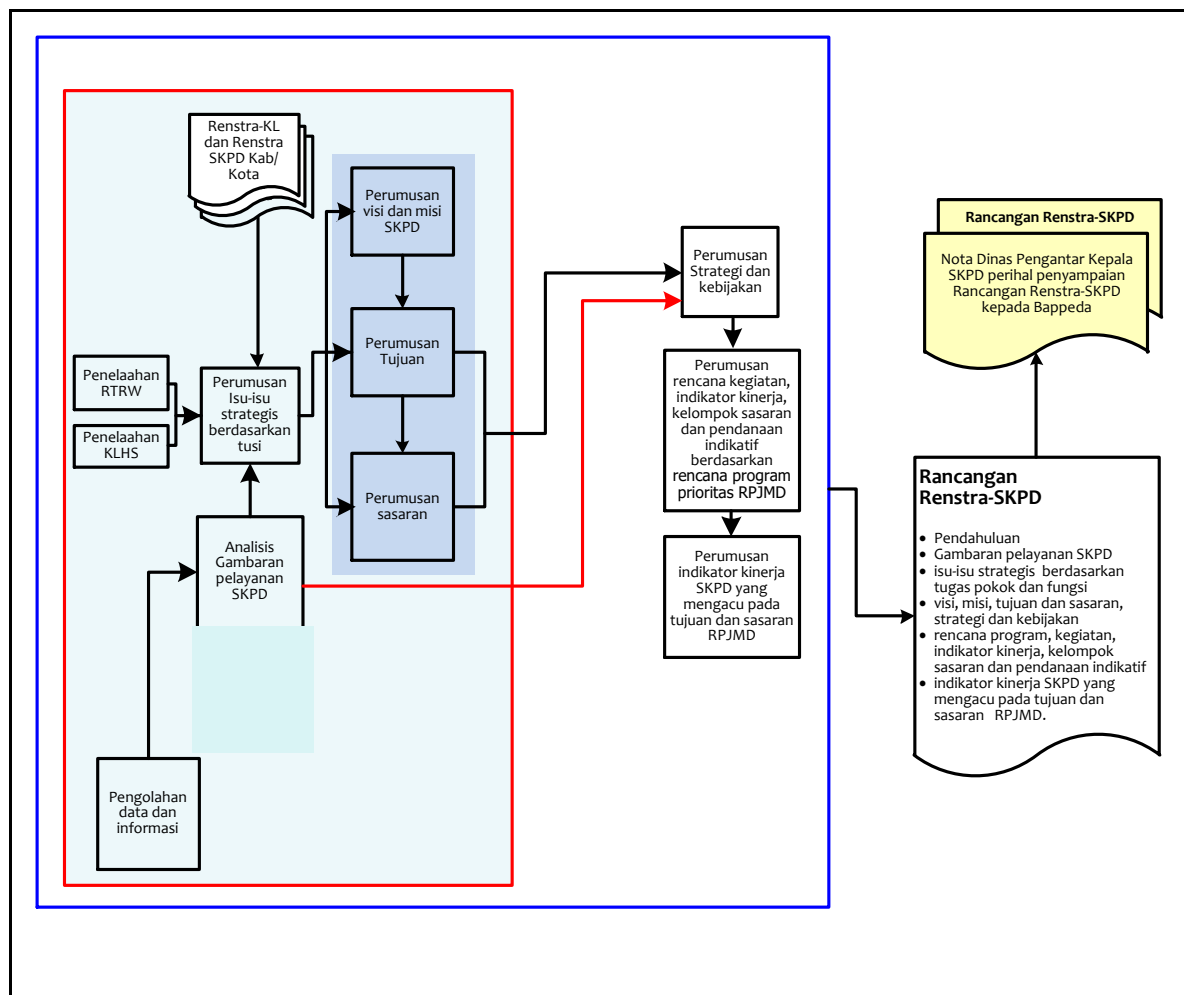
Renstra Adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi SKPD. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. Renstra SKPD adalah acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan

Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Ruang;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ;
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefiksi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 tahun 2013 tentang tata Ruang Provinsi;
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 44. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
 45. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan berdasarkan Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini, yang

meliputi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja, serta target dan pendanaan indikatif. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklator yang diatur dalam Permendagri

Bab V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Susunan organisasi dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala, melaksanakan tugas pokok Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat, mempunyai tugas pokok membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaantugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan dinas/Dinas/kantor/lembaga teknis dan Instansi Vertikal lainnya, dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Dinas , dengan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- c. Melaksanakan urusan kehumasan;
- d. Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- g. Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, dengan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan tatalaksana keuangan;
- b. Melaksanakan urusan perbendaharaan , gaji, perjalanan dinas Dinas;
- c. Melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- d. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Program.

Sub Bagian Program Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan, program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan , pengolahan dan penyiapan data untuk penyusunan program Dinas;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- c. Pelaksanaan Monitoring; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas pokok Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi sosial budaya politik hukum dan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan;
- e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok Membantu bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka perlindungan perempuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :
 - b. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - e. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - h. Penyusunan data perlindungan perempuan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Fungsi:

 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - g. Penyusunan data bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 3 . Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan, dengan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - g. Penyusunan data bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- d. Bidang Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok Membantu Dinas dalam rangka perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang perlindungan anak.
 Fungsi:
 1. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan
 5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.

7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri atas :

- 1 Seksi Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok Membantu bidang Perlindungan Anak dalam rangka Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- g. Penyusunan data Perlindungan Anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2 Seksi Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan Alternatif Anak, mempunyai tugas Membantu bidang Perlindungan anak dalam Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak.

Melaksanakan Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- g. Penyusunan data bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Tumbuh Kembang Anak, mempunyai tugas pokok Membantu bidang Perlindungan Anak dalam Bidang Tumbuh Kembang Anak. Mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
 - g. Penyusunan data Bidang Tumbuh Kembang Anak;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas pokok Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.
- Mempunyai Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - d. Pelaksanaan pemetaan urusan Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1 . Seksi Penetaan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan mempunyai tugas Melaksanakan tugas bidang dalam rangka fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.
Fungsi :
 - a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2 . Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa mempunyai tugas Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan keuangan serta aset pemerintahan desa.
Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa,

- sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan, mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- Fungsi :
- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai tugas pokok Membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi

desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

Mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan Masyarakat desa.
5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, mempunyai tugas Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUM desa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, mempunyai tugas Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- 3 . Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- Fungsi :
- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan

pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan TTG, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Pengelolaan Kependudukan;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pengendalian penduduk
- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang analisa dampak kependudukan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Keluarga Berencana;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur

pemrintah dan swasta

- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.
 - c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pelayanan keluarga berencana.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Kesehatan Reproduksi.

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas Teknis Operasional/teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. Pengaduan Masyarakat;
- b. Penjangkauan dan Pendampingan Kekerasan;
- c. Pengelolaan Kasus;
- d. Penampungan Sementara;

- e. Perlindungan Khusus Anak;
- f. Mediasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang lainnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi khusus, dan masalah lainnya, dan untuk melaksanakan tugas tersebut kepala UPTD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. Penyusunan program kerja UPTD PPA;
- c. Penetapan rencana intervensi dan terminasi pelayanan khusus;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. Pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu mengendalikan dan mengelola tata laksana administrasi, kepegawaian, keuangan, asset, rumah tangga dan dukungan umum UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan asset;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan system data, dokumentasi, pelaporan serta informasi layanan;

- e. Penyiapan dukungan umum pelayanan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengaduan

Mempunyai tugas membantu melayani penerimaan pengaduan, identifikasi, klasifikasi terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengaduan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan;
- b. Pengidentifikasi dan klarifikasi pengaduan;
- c. Pemantauan dan penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
- e. Pengelolaan call center pengaduan;
- f. Perlindungan korban di penampungan sementara; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

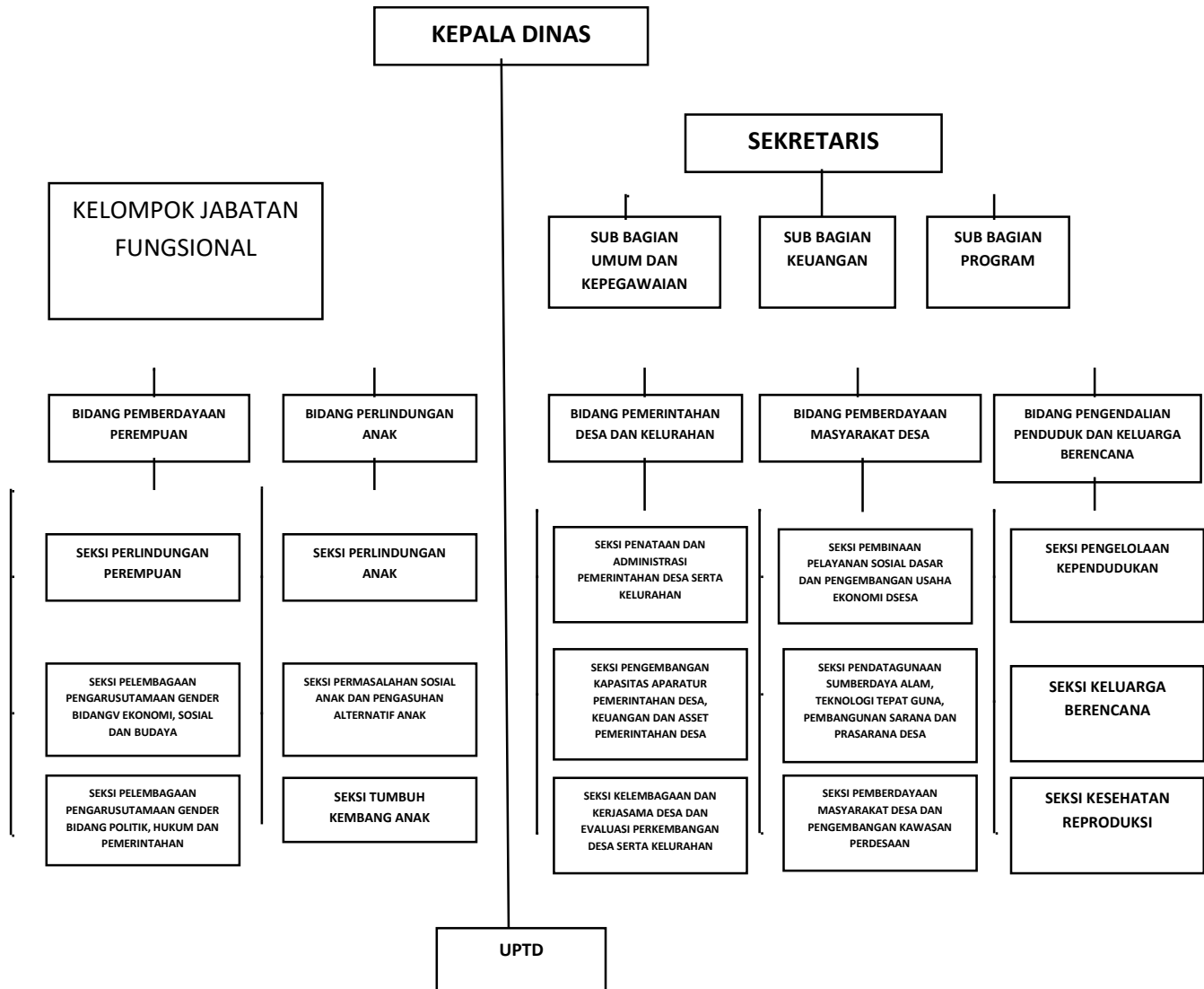
4. Seksi tindak Lanjut

Mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana intervensi yang telah ditetapkan oleh kepala UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Tindak Lanjut memiliki fungsi sebagai berikut :

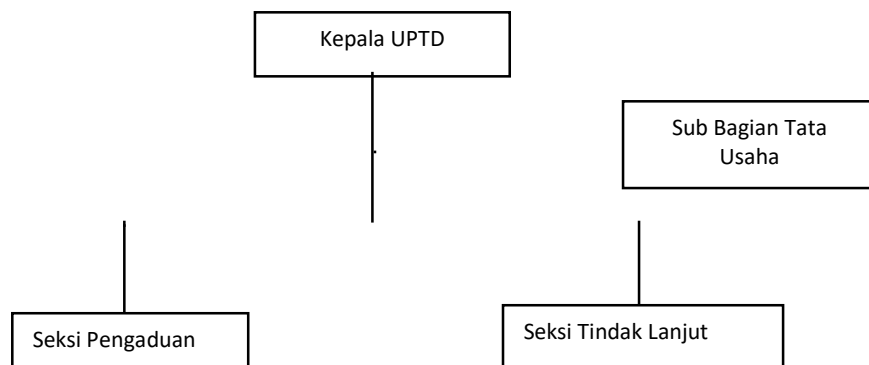
- a. Pelayanan pendamping hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendamping pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- b. Pelayanan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- c. Pelayanan mediasi;
- d. Penyusunan pelaporan pelayanan dan rencana terminasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk

(Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Provinsi Jambi)



Struktur organisasi organisasi UPTD Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Jumlah pegawai sebanyak 65 (enampuluh lima) orang pegawai tetap dan 12 (duabelas) orang pegawai honorer (PTT) maka jumlah pegawai pada DP3AP2 Provinsi Jambi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	2	2	1	5
3	D3	-	2	-	1	3
4	S1	15	36	5	4	60
5	S2	5	4	-	-	9
6	S3	-	-	-	-	-
7	JUMLAH TOTAL					77

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Tahun 2020

Uraian analisis kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan masih kurangnya sumber daya manusia lulusan strata II (S.2) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, sedangkan, jumlah pegawai berdasarkan golongan sudah mencukupi dikarenakan banyaknya pegawai yang bergolongan III dan di butuhkan pegawai yang bergolongan II. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini rincian pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	2	2
2	Golongan III	25	28	53
3	Golongan IV	5	5	10

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Tahun 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2021 terdapat 45 aset dengan kondisi rusak. Pada Tabel 2.3 menjelaskan kondisi aset DP3AP2 Provinsi Jambi pada Tahun 2020.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Sepeda Motor	12	1	13
2	Kendaraan Roda Empat	11	-	11
3	Meja Kerja Biro Besar	2	-	2
4	Meja Kerja Biro Sedang	7	3	10
5	Meja Rapat	1	-	1
6	Meja ½ Biro	12	3	15
7	Meja Pimpinan Rapat	1	-	1
8	Meja Rapat Oval	1	-	1
9	Meja Balkon	1	-	1
10	Meja Sudut Ruang Laktasi	1	-	-
11	Meja Laktasi	2	-	2
12	Kursi Biro Sedang	6	-	6
13	Kursi ½ Biro	7	-	7
14	Meja Rapat Panjang	1	-	1
15	Kursi Rapat	8	2	10
16	Kursi Biro S Tinggi	18	-	18
17	Kursi Kerja Eselon III	4	3	7
18	Kursi Kerja Eselon IV	6	1	7
19	Komputer Pc	19	3	22
20	Laptop	7	-	7
21	Kursi Putar	13	3	16
22	Kursi Lipat	11	4	15
23	Kursi Tamu	7	-	7
24	Kursi Tunggu Tamu	2	-	2
25	Kursi Kayu Biasa	4	4	8
26	Sofa Laktasi	2	-	2
27	Kursi Ruang Tamu Kadis	1	-	1
28	Sice Tamu Ruang Kadis	1	-	1
29	Kipas Angin	10	4	14
30	Ac 1 PK	7	1	8
31	AC 2 PK	1	-	1
32	AC Portable	1	-	1
33	AC Pendingin Ruangan	2	-	2
34	Dispencer dan Galon	8	-	8
35	Dispencer	1	-	1
36	Podium	1	-	1
37	Lemari Besi	7	2	9
38	Preezer	1	-	1
39	Lemari Kaca	4	1	5

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
40	Lemari Arsip	10	-	10
41	Lemari	2	1	3
42	Brankas	1	-	1
43	Filling Kabinet	11	3	14
44	Laptop	9	-	9
45	Speaker Aktif	1	-	1
46	Printer Dot Matrix	2	-	2
47	Printer Inkjet Color	8	-	8
48	Printer	14	1	15
49	Unit UPS	17	1	18
50	Zice	1	2	3
51	Jam Dinding Meja	7	-	7
52	Hordeng Croy Ruang Kadis	1	-	1
53	Hordeng Biasa Ruang Tunggu dan Ruang Tunggu Kadis	2	-	2
54	Hordeng Biasa Doble Ruang Sekdis	1	-	1
55	Hordeng Biasa R Aula	1	-	1
56	Hordeng Biasa R Lantai 1	1	-	1
57	Hordeng Biasa R Lantai 2	1	-	1
58	Tirai Ruang Laktasi	1	-	1
59	Karpet Mushola	1	-	1
60	Karpet Ruang Laktasi	1	-	1
61	Sarung Kursi Rapat	1	-	1
62	Deploy Meja Rapat	1	-	1
63	Mesin Absensi	1	-	1
64	Mesin Foto Copy	1	-	1
65	Papan Data	2	-	2
66	Papan Nama Ruang Laktasi	1	-	1
67	Printer Scanner	2	-	2
68	Note Book	3	-	3
69	Televisi	2	1	3
70	Studio System	18	-	18
71	Kamera	5	1	6
72	Infocus	2	-	2
73	Layar Proyektor	1	-	1
74	Thermogen	2	-	2
75	Telepon dan Facsmile	1	3	4

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Tahun 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan di DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2021 s.d 2026 sudah cukup baik. Akan tetapi, ada beberapa indikator kinerja yang belum bisa dicapai secara optimal karena terdapat beberapa kendala diantaranya persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman SDM

baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Persentase desa memiliki pelayanan publik yang disebabkan karena kurangnya anggaran untuk membangun sarana dan prasarana yang menangani pelayanan publik. Persentase desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik yang diakibatkan oleh kurang pemahaman dari aparatur desa. Selain itu, persentase pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi yang masih cukup tinggi hal ini disebabkan masih banyaknya pasangan muda yang menikah di usia dini dan pasangan subur yang enggan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Pencapaian kinerja pelayanan DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	NSPK Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1.	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan				30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	27,63 %	27,63 %	27,63 %	28,58 %	12 %	92,10 %	92,10 %	92,10 %	95,26 %	40 %
2.	Persentase Penanganan Kasus Keserasan terhadap Perempuan dan Anak				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase Kab/Kota Layak Anak				54,40 %	54,40 %	54,50 %	72,70 %	81,80 %	36,30 %	36,30 %	36,30 %	54,54 %	54,54 %	49,93 %	49,93 %	49,93 %	75,02 %	66,67 %
4.	Persentase BUMDesa yang terbentuk				92,99 %	92,99 %	100 %	100 %	100 %	59,04	59,04	59,04	79,54 %	86,95 %	63,49 %	63,49 %	63,49 %	79,54 %	86,95 %
5.	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG				6 %	6 %	6 %	20 %	20 %	30,60 %	30,60 %	30,60 %	65,03 %	65,03 %	153 %	153 %	153 %	325,15 %	325 %
7.	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan yang Mengembangkan Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal				100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Persentase Desa Cepat Berkembang				6,2 %	6,2 %	6,2%	7 %	7 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	12,22 %	12,22 %	104,84 %	104,84 %	104,84 %	174,57 %	174,57 %
9.	Total Fertility Rate (TFR)				2,23	2,23	2,23	2,21	2,21	2,23	2,23	2,23	2,31	2,31	100 %	100 %	100 %	95,67 %	95,67 %

Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
Tahun 2016 – 2020**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																	
	Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	960.64 0.000	538.45 2.250	489.25 2.000	-	-	960.63 7.188	537.97 9.000	488.99 8.400	-	-	100 %	99,91 %	99,95 %	-	-	662.781.4 17	662.538.196
	Bimtek Penyusunan Profil Desa	213.22 8.000					211.63 3.600					99,25 %					213.228.0 00	211.633.600
	Pembinaan dan Perlombaan Desa	346.13 2.000	406.59 2.250	301.33 6.000			341.15 9.214	406.54 2.250	301.29 1.400			98,56 %	99,99 %	99,99 %			150.283.5 00	349.664.288
	Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan				232.20 0.000	68.367. 000				232.20 0.000	60.579. 050				100 %	97,68 %	150.283.5 00	146.389.525
	Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan kelembagaan desa					15.170. 000					15.170. 000					100 %	15.170.00 0	15.170.000
	Pelatihan Aparatur Pemdes Dalam Pemdes				660.95 4.500					655.26 7.505					97,98 %		660.954.5 00	655.267.505
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan																	
	Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanel Posyandu	87.628. 650	90.000. 000	120.18 3.750	70.000. 000		87.628. 650	89.999. 950	119.93 4.900	69.999. 020		100 %	99,99 %	99,79 %	99,99 %		91.953.10 0	91.890.630
	Pemberdayaan Nilai-nilai Kegotongroyongan, Adat Daerah dan Masyarakat Hukum Adat	251.83 4.750	451.79 9.500	343.47 3.000	275.00 0.000		155.64 7.750	408.02 4.100	343.22 1.400	275.00 0.000		51,81 %	90,31 %	99,93 %	100 %		330.526.8 12,5	295.473.312 ,5
	Penguatan Kelembagaan Posyandu Lansia dan Komda Lansia	48.940. 750	61.823. 250				48.940. 750	61.783. 250				100 %	99,94 %				55.382.00 0	55.362.000
	Penguatan Kelembagaan KPA dan P4GN	98.650. 000					80.040. 750					81,14 %					98.650.00 0	80.040.750

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	119.84 9.750	268.88 3.000	180.14 2.000	268.66 0.000	66.346. 500	93.680. 451	255.79 6.640	179.89 2.000	268.66 0.000	66.346. 500	78,16 %	95,13 %	99,86 %	100 %	100 %	180.776.2 50	172.875.018
	Pembinaan dan penilaian P2WKSS	192.00 0.000	126.00 0.000	182.81 0.000	142.32 0.000		134.00 5.250	125.74 9.500	182.81 0.000	140.64 5.500		69,79 %	99,80 %	100 %	97,69 %		160.782.5 00	145.802.437
	Penguatan kapasitas Pengelolaan BumDesa	83.197. 400	137.93 4.000	195.30 9.750	150.00 0.000	46.366. 000	71.457. 580	137.93 4.000	195.30 4.969	150.00 0.000	46.366. 000	85,89 %	100 %	99,99 %	100 %	100 %	122.561.4 30	120.212.510
	Penguatan Pendampingan di Perdesaan	600.47 5.950	678.73 9.000	298.05 9.500	150.00 0.000	84.399. 800	441.97 0.450	578.55 2.000	297.69 9.500	149.70 0.400	84.399. 800	73,60 %	85,24 %	99,88 %	99,65 %	100 %	362.334.8 50	310.464.430
	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang UEP	225.00 2.600	161.75 1.000	87.362. 500			190.50 4.400	161.17 8.000	87.349. 800			87,67 %	99,65 %	99,99 %			158.038.7 00	146.344.067
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1.617.0 00.000	1.599.1 56.000	1.600.0 00.000	1.500.0 00.000	715.00 0.000	1.347.9 52.223	1.547.4 36.264	1.592.1 49.022	1.487.8 43.283	703.30 6.904	83,36 %	99,77 %	99,51 %	97,98	96,95 %	1.406.231 .200	1.335.737.5 39
	Pameran Hasil karya di Bidang Pembangunan / Jambore				60.000. 000					60.000. 000					100 %		60.000.00 0	12.000.000
	Pemberdayaan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Pamsismas				40.000. 000					40.000. 000					100 %		40.000.00 0	40.000.000
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																-	-
	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	18.460. 000	180.00 0.000	59.800. 000	137.43 9.000		18.431. 100	179.07 1.000	58.690. 440	136.59 3.600		99,84 %	99,48 %	98,14 %	99,14 %		98.924.75 0	98.196.535
	Fasilitasi Pengembangan P2TP2	240.00 0.000	239.80 5.000	320.11 0.000	650.00 0.000		240.00 0.000	239.76 5.000	317.98 1.100	643.49 9.900		100 %	99,98 %	99,33 %	99,67 %		362.478.7 50	360.311.500
	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	76.061. 500	-	-			76.061. 500					100 %					76.061.50 0	76.061.500

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
	Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Anak	319.79 0.000	358.58 8.000	215.81 5.700	250.00 0.000	77.100. 000	303.74 4.000	344.36 6.100	214.99 0.700	249.92 2.200	77.097. 200	94,98 %	96,03 %	99,62 %	99,43 %	99,99 %	244.258.7 40	238.024.040 238.024.040
	Kominumkasi, Informasi dan Edukasi mengenai perlindungan Anak	77.945. 050	180.00 0.000	129.88 0.800	112.56 1.000	58.150. 000	77.945. 050	173.11 2.400	129.04 2.200	111.53 2.600	58.062. 000	100 %	96,17 %	99,35 %	99,43 %	99,80 %	111.707.3 70	109.938.850
	Pembinaan dan pwengembangan Tumbuh Kembang Anak	43.252. 500	70.096. 000				43.230. 500	70.096. 000				99,95 %	100 %				56.674.25 0	56.663.250
	Penghembangan materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	100.00 0.000					100.00 0.000					100 5					100.000.0 00	100.000.000
	Penyusunan Sistem Perluindungan bagi Perempuan	65.175. 200	339.24 6.000				62.059. 200	324.48 3.400				95,22 %	95,65 %				202.210.6 00	193.271.300
	Perlindungagn perempuan terhadap Tindak kekerasan	75.500. 000	60.000. 000	90.342. 000	90.000. 000		75.440. 000	60.000. 000	90.148. 000	89.900. 900		99,92 %	100 %	99,79 %	99,99 %		78.960.50 0	78.872.225
	Pembinaan OPenilaian Perusahaan Pembina terbaik Tenmaga Kerja Perempuan,GSI dan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan	65.791. 600					65.791. 600					100 %					65.791.60 0	65.791.600
	Pembinaan Organisasi Perempuan	350.00 0.000	433.75 4.000	488.29 5.000	350.00 0.000	217.72 7.700	341.29 1.400	432.58 3.400	488.11 5.000	348.30 0.100	217.63 8.808	97,51 %	99,73 %	99,96 %	98,99 %	99,80 %	367.955.3 40	365.585.742
	Evaluasi Pelaksanaan PUG		211.05 2.500	168.52 8.900	159.68 0.000	109.10 0.320		209.44 2.500	168.52 8.900	159.34 3.250	109.10 0.320		99,24 %	100 %	99,14 %	100 %	162.090.4 30	161.603.743
	Sosialisasi Pendidik Politik Perempuan			22.252. 000	70.000. 000				21.752. 000	69.425. 650				97,75 %	99,70 %		46.126.00 0	45.588.825
	Sosiliassi Pola Asuh Anak dalam keluarga dan Lingkungan			102.25 0.500	77.000. 000				101.83 7.320	76.768. 000				99,60 %	99,86 %		89.625.25 0	89.302.660

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan dan pengembangan kota Layaj Anak			118.20 7.500	173.00 0.000	53.975. 000			117.58 9.160	172.93 2.800	53.975. 000			99,48 %	98,99 %	100 %	115.060.8 33	114.832.320
	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan Korban KDRT			133.01 9.600	133.00 0.000	102.45 4.987			132.57 9.600	133.00 0.000	102.45 4.987			99,67 %	100 %	100 %	122.824.8 62	122.678.196
	Pelayanan dan Pendampingan Korban kekerasan					246.81 4.000					243.93 4.960					98,83 %	246.814.0 00	243.934.960
4	Program Pengendalian Penduduk dan KB																-	-
	Pembinaan Kampung KB			193.31 3.800	159.51 0.000					188.83 8.800	159.50 9.950			97,69 %	99,99 %		176.411.9 00	174.174.375
	Pemutakhiran Data Kependudukan			74.911. 550							74.882. 450			99,96 %			74.911.55 0	74.882.450
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja			184.56 2.650	93.070. 000	10.000. ;000			179.86 9.950	92.737. 200	10.000. 000			97,46 %	99,89 %	100 %	55.526.53 0	56.521.430
	Momentum HARGANAS				126.25 0.000					126.22 5.000					99,90 %		126.250.0 00	126.225.000
	Workshop Pendidikan Program KKBPK				121.17 0.000	28.688. 000				121.17 0.000	28.688. 000				100 %	100 %	74.929.00 0	74.929.000
	Advokasi Pengendalian penduduk dan KB					82.000. 000					82.000. 000					100 %	82.000.00 0	82.000.000

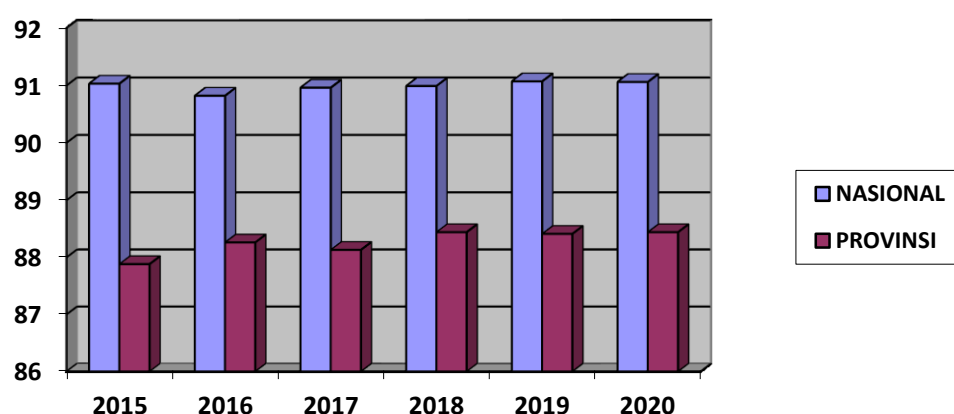
Penyerapan anggaran di DP3AP2 Provinsi Jambi sudah cukup baik. Dari tahun 2016 s.d 2020 rata-rata penyerapan anggaran melebihi 90% dari pagu anggaran yang ada. Di bawah ini merupakan gambaran anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020. Meskipun dalam setiap tahunnya pagu anggaran yang diterima cenderung menurun, namun demikian, capaian target kinerja tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Dari 5 Tahun Anggaran yang dilalui, serapan anggaran pada tahun 2018 merupakan serapan anggaran tertinggi yaitu sebesar 99,67 %.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesenjangan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Jambi menunjukkan terus meningkat dari waktu ke waktu seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



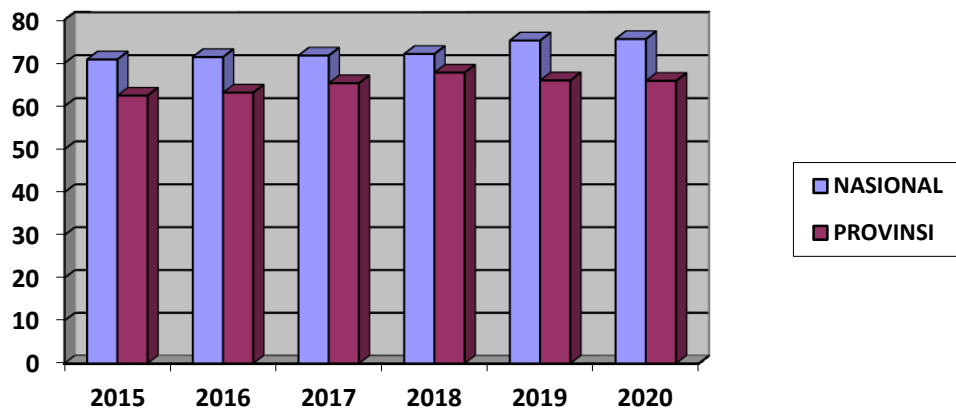
Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jambi dengan IPG Nasional

Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2020*

Dilihat capaian IPG Provinsi Jambi menunjukkan ada peningkatan dari tahun ke tahun meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Provinsi Jambi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 juga mengalami peningkatan dan cenderung naik, dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 67,78. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.3. IDG Provinsi Jambi 2015 - 2020

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2020.*

Rendahnya capaian IDG Provinsi Jambi masih disebabkan masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen dan kontribusi pendapatan domestik perempuan.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut didominasi pelecehan atau kekerasan seksual dan penganiayaan. Selama ini banyak kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak dilaporkan atau didiamkan keluarga serta warga masyarakat. Akibatnya tindak kekerasan anak dan perempuan sering berulang. Namun, belakangan ini kesadaran warga masyarakat melaporkan tindak kekerasan anak dan perempuan meningkat. Meningkatnya tindak kekerasan terhadap

anak dan perempuan di Provinsi Jambi dipengaruhi kurangnya pengawasan warga masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan di lingkungannya. Warga masyarakat di Jambi masih banyak yang kurang memperhatikan kehidupan tetangganya, sehingga tindak kekerasan anak dan perempuan di sekitar mereka sering tidak diketahui.

Pelaku tindak kekerasan di Jambi banyak dilakukan anggota keluarga terdekat. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut sering kurang terpantau karena warga kurang memperhatikan tetangganya. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan baru terungkap setelah muncul pengaduan. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Jambi banyak terjadi di daerah pedesaan. Kecenderungan tersebut terjadi karena pengawasan terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan masih relatif kurang. Kemudian kondisi permukiman warga masyarakat di pedesaan berjauhan. Ada empat jenis kekerasan yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi di Provinsi Jambi ialah kekerasan psikis. Pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terdapat 633 Pelapor dengan berbagai kasus, dan kasus terbanyak yaitu kasus kekerasan Psikis baik terhadap perempuan maupun anak.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan pengendalian penduduk di Kampung KB;
- j. Persentasi penduduk yang tinggal di Perkotaan akan semakin meningkat terutama karena perpindahan penduduk dari desa yang beranggapan bahwa dikota akan mendapatkan pekerjaan.
- k. Pelayanan kepada masyarakat yang belum terpenuhi untuk ber-KB dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.
- l. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Dana Desa dan Pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran.
- m. Memaksimalkan Pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana Desa agar tepat sasaran oleh Tenaga Pendamping.
- n. Mewujudkan Desa Percontohan PKK di 11 Kab/Kota agar menciptakan keluarga bahagia adalah keluarga yang memenuhi 10 Program Pokok PKK.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Sudah terbentuknya beberapa Desa Kampung KB di Provinsi Jambi.
- h. Tersedianya Bantuan Dana Desa dalam program Dua Milyar Satu Kecamatan (DUMISAKE) dari Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan visi misi Gubernur Jambi.
- i. Tersedianya Pendamping Desa yang dapat mengawasi perangkat desa dalam pemanfaatan dan penggunaan dana Desa di Provinsi Jambi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2 Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik ;
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1) Tingginya korban kekerasan pada anak;
 - 2) Tingginya kasus kekerasan perempuan;
 - 3) Belum optimal pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - 4) Masih kurangnya peran forum anak;
 - 5) Belum optimalnya kelembagaan PUG;
 - 6) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota;
 - 7) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
 - 8) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;
 - 9) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
 - 10) Belum semua PD melaksanakan PPRG;
 - 11) Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak;
 - 12) Belum optimalnya Program PATBM;
 - 13) Tingginya pekerja anak;
 - 14) belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan;
 - 15) belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
 - 16) Belum optimalnya perempuan sebagai petugas profesional;
 - 17) Ditemukannya TPPO;
 - 18) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislative.

c. Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- 1) Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi;
 - 2) Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
 - 3) Masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Provinsi Jambi;
 - 4) Masih banyak aparatur desa yang belum memahami pengelolaan administrasi desa dan ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik;
 - 5) Masih sedikitnya desa yang mendirikan BUMDesa;
 - 6) Kurangnya pengetahuan tenaga pendamping desa;
 - 7) Belum optimalnya TTG;
 - 8) Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik) ;
 - 9) Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan desa dan Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat;
 - 10) Ditemukannya desa yang belum menerapkan SPM .
-)

d. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk Jambi diatas rata-rata nasional;
- 2) Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmetneed*);
- 3) Tingginya angka Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga;
- 4) Persentase laki-laki ber-KB belum sesuai dengan angka harapan atau target nasional;
- 5) Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
- 6) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM nasional dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi;
- 7) Angka penderita penyakit IMS/HIV/AIDS masih tinggi dan belum terdeteksi;

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut secara umum, disebabkan antara lain :

1. *Constitutional inferiory*, yaitu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri organisasi sendiri seperti Sumber Daya Manusia yang masih memerlukan peningkatan kapasitas.
2. *Socialization defect*, yaitu kelemahan dalam penyampaian nilai-nilai dan pengetahuan yang lambat kepada sumber daya pelaku.

3. *Cultural defect*, yaitu kelemahan-kelemahan secara kultural yang ada dalam masyarakat yang sangat menghambat dalam proses perubahan yang dilakukan melalui program-program yang diberikan.
4. *Accumulated Environment defect*, kelemahan-kelemahan yang secara akumulasi terjadi di masyarakat, seperti tumpang tindihnya kebijakan, banyaknya peraturan yang kontra produktif, serta persepsi yang tidak kondusif yang terjadi di masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah ***“Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Di Bawah Lindungan Allah SWT ” Jambi MANTAP 2025-2029***. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas;
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian ketiga misi yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Misi ke 1 (satu) dengan Tujuan, sebagai Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas, Misi ke 2 (dua) dengan tujuan Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Misi ke 3 (tiga) dengan Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Povinsi Jambi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: - Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan ; - Memantapkan Perekomonian Masyarakat - Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender belum tinggi; 2. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung meningkat; 3. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jamb;	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk melaksanakan penganggaran yang responsig gender • Pemanfaatan anggaran yang tersedia
2	Tujuan: - Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas; - Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan	4. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencanan pembangunan desa; 5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk; 6. Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed)	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di beberapa desa • Masih minimnya pelatihan aparatur desa	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A dan personil untuk melayani korban kekerasan • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kesejahteraan masyarakat - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	7. Masih kurangnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa; • Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan penting ber-KB • Masih kurangnya kapabilitas lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, dan masyarakat hukum adat dalam melaksanakan fungsi dan perannya	• Adanya kerjasama antar pemerintahan daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana • Telah tersedianya tenaga pelatih dalam proses pengelolaan keuangan desa dan penyusunan rencana pembangunan desa. • Terbentuknya desa kampung KB • Terbentuknya lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan adanya masyarakat hukum adat
3	Sasaran: - Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan; - Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan pelayanan pada instansi / lembaga pemerintah daerah yang melayani public - Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan - Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	bidang kehidupan			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

a. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan

komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.		lembaga P2TP2A
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Telaah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan;

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini yaitu

- a. Berkembangnya status pembangunan desa, yaitu 6.444 Desa Mandiri, 59.291 Desa Berkembang dan 9.152 Desa Tertinggal
- b. Meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan
- c. Menurunnya kemiskinan di perdesaan sebesar 9,90 % Tahun 2024

2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan

Sasaran yang ingin dicapai berikut:

- a. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebanyak 10.000 BumDesa Berkembang, 1.800 Bumdes Maju.

- b. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesmas), yaitu 300 BumDes Bersama berkembang serta 200 BumDes Bersama Maju
 - c. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi sebesar 2,50 % Tahun 2024
- 3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal
 Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
 - a. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal
 - b. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 23,75 % Tahun 2024
 - c. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal sebesar 62,20 Tahun 2024
- 4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah
 Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi
- 5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
 Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing, pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi sebesar 90 % Tahun 2024
- 6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi
 Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi sebesar 90 % tahun 2024
- 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya
 Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi
- b. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif

c. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui tujuan keenam yaitu Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri melalui sasaran strategis sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;
- 3. Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;	Kurangnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik	Rendahnya kualitas SDM	Menguatnya tuntutan dalam penyelenggaraan GG
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik dan adanya desa yang belum menerapkan SPM	Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Menguatnya dukungan peningkatan kapasitas
3.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.	Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik)	Keterbatasan anggaran	Meningkatnya kebutuhan akan informasi yang transparan dan akuntabel

d. Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2019 - 2024, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2019 - 2024. Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu :

- 1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi **Terwujudnya Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri, Dan Berkeprihidian Berlandaskan Gotong Royong**". Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk yang seimbang;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan masyarakat global;
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDN Aparatur

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / TFR yang dapat mencapai 2,1 pada tahun 2024
2. Meningkatnya angka Prevalensi pemakaian Kontrasepsi Modern / MCFR menjadi 63,41% pada Tahun 2024
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / UnMetneed menjadi 7,4 % Tahun 2024
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) menjadi 18 per 1000 kelahiran Tahun 2024
5. Meningkatnya indeks pembangunan keluarga (iBangga) menjadi 61,00 Tahun 2024
6. Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP) menjadi 22,1 Tahun 2024

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / TFR	Masih rendahnya sosialisasi ttg KB pada WUS	Kurangnya pengetahuan remaja/WUS kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi	Kepedulian masyarakat terhadap Kebutuhan berKB masih tinggi pernikahan diusia dibawah 20 tahun
2. Meningkatnya angka Prevalensi pemakaian Kontrasepsi Modern / MCFR	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Organisasi atau instansi terkait peduli terhadap KB
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / UnMetneed	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Organisasi atau instansi terkait peduli terhadap KB
4. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	Pemahaman tentang ketakutan orangtua terhadap anak diatas 20 tahun akan jauh jodoh	Adat istiadat, kebiasaan pada masyarakat tersebut
5. Meningkatnya indeks pembangunan keluarga (iBangga)	Masih kurangnya pemahaman keluarga tentang fungsi keluarga dalam upaya pembentukan karakter keluarganya	Terjadinya pergeseran nilai di masyarakat	Struktur social dan kultur masyarakat
6. Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP)	Tingginta perkawinan usia muda	Adat, nilai,norma di masyarakat tentang perkawinan	Adanya regulasi tentang Perkawinan Anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tidak bersinggungan dengan Rencana struktur tata ruang dan Rencana pola ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tidak bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.5
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	20
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota	20
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	15
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	15
5	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.6
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rang-king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	1
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	2
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	3
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	4
5	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	5	100	5	100	5	75	3	45	4	120	440	5
6	Belum optimalnya Program PATBM	4	80	5	100	5	75	3	45	4	120	420	
7	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik	4	80	4	80	5	75	3	45	4	120	400	

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota;
3. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan;
4. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tinggi perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program dan kegiatan.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan Public berkualitas.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama ini yaitu

1. Meningkatkan penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar;
 2. Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa;
 3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.
2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua ini yaitu

1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa;
 2. Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan;

2. Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak;
 3. Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat ini yaitu
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 2. Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tahun 2021 - 2026

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan Public berkualitas	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	Persentase peningkatan pelaksanaan kerja sama desa	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80 %
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa	60 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	Persentase BumDes yang aktif	57,89 %	60 %	63 %	67 %	70 %	75 %
		Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang terbentuk	4 Kab	5 Kab	6 Kab	8 Kab	9 kab	10 Kab
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan)	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
			INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	IDG 67,78	IDG:67,78	IDG:69,02	IDG:70	IDG:73	IDG:73
		Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak	Persentase perempaun dan anak korban tindak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif						
			Persentase Kab/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate	2,31	2,27	2,21	2,20	2,19	2,17
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	83.50 (baik)	84.00 (baik)	84.50 (baik)	85.50 (baik)	86.00 (baik)	86.00 (baik)
		Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Prediket AKIP	B	BB	BB	BB	A	A

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program serta kegiatan. Kebijakan merupakan suatu arahan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persentase penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar;
- b. Meningkatkan persentase kerjasama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa;
- c. Meningkatkan persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan persentase BumDes yang aktif;
- e. Meningkatkan persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG;
- f. Meningkatkan persentase kawasan perdesaan yang terbentuk;
- g. Meningkatkan persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- h. Meningkatkan persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif;
- i. Meningkatkan persentase Kab/Kota Layak Anak
- j. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)
- k. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi aparatur desa dan kelurahan dengan fokus pada bintek penataan desa;
- b. Peningkatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk membentuk jaringan kerja sama antar desa / kelurahan

- c. Peningkatan kompetensi aparatur desadan kelurahan dengan focus pada Bintek Pengelolaan AdminstrasiPemerintahn Desa
- d. Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan fokus pada pengelolaan BUMDes yang aktif
- e. Peningkatan bimbingan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat melalui Bimtek TTG
- f. Pengembangan kawasan perdesaan
- g. Peningkatan fasilitasi kesempatan terhadap terhadap perempuan dalam pembangunan ;
- h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Permasalahan Sosial dan pengasuhan Alternatif Anak menuju Kesejahteraan Anak;
- i. Penguatan kabupaten kota layak anak dengan fokus pada kabupaten kota yang sudah menginisiasi/ menuju kab/kota layak anak;
- j. Peningkatan cakupan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur.
- k. Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2021 -2026**

Visi : “maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional” JAMBI MANTAP 2026			
Misi : I Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan ;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yg bersih, transparan,dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Meningkatkan persentase penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar;	Peningkatan kompetensi aparatur desa dan kelurahan dengan fokus pada bintek penataan desa
	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	Meningkatkan persentase kerjasama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa;	Peningkatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk membentuk jaringan kerja sama antar desa / kelurahan
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Meningkatkan persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan kompetensi aparatur desadan kelurahan dengan focus pada Bintek Pengelolaan AdminstrasiPemerintahan Desa
	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat
Misi : II Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	Meningkatkan persentase BumDes yang aktif	Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan fokus pada pengelolaan BUMDes yang aktif
	Meningkatnya pendayagunaan	Meningkatkan persentase kelompok	Peningkatan bimbingan dan

	TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	masyarakat yang memanfaatkan TTG	pembinaan terhadap kelompok masyarakat melalui Bimtek TTG
	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan	Meningkatkan persentase kawasan perdesaan yang terbentuk	Pengembangan kawasan perdesaan
Misi : III			
Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan Dalam Pembangunan, Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Laju Pertumbuhan Anak serta Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Permasalahan Sosial dan pengasuhan Alternatif Anak menuju Kesejahteraan Anak
	Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak	Meningkatkan persentase Kab/Kota Layak Anak	Penguatan kabupaten kota layak anak dengan fokus pada kabupaten kota yang sudah menginisiasi/ menuju kab/kota layak anak
	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)	Peningkatan cakupan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

C. Program perlindungan perempuan

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

1. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
3. Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi

D. Program peningkatan kualitas keluarga

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak kewenangan provinsi.

2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak kewenangan provinsi.
3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota

E. Program Daerah Provinsi Pengelolaan System Data Gender dan Anak

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.

F. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

G. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/Kota

H. Program Penataan Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
2. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa

I. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

J. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

K. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengendalian Penduduk

L. Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas penduduk
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Provinsi

Program Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- M.**
1. Pengembangan desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Kearifan Lokal
 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Program Pemberdayaan Dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- N.**
1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

TABEL 4.2 MATRIX RENSTRA 2026
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PD

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel				12,000,000,000		12,710,000,000		14,397,000,000		14,397,000,000		18,397,000,000
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	16,54	70,01	70,25	12,000,000,000	70,5	12,710,000,000	71	14,397,000,000	71,25	14,397,000,000	71,75	18,397,000,000
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Predikat)	75	80	82		83		85		88		88	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,25	77	77,75		78,5		79,25		80		80,75	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	146	1 Dokumen	200	1 Dokumen	250	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	jumlah Dokumen RKASKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	70	1 Dokumen	70	1 Dokumen	70	1 Dokumen	70	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Periode koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	150	12 Bulan	200	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Periode Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100	100	10.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	100	10.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Periode pelaksanaan administrasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	30	12 Bulan	30	12 Bulan	30	12 Bulan	30	12 Bulan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Periode koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Periode koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Periode koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen

	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	700	Baik	800	Baik	900	Baik	1.000	Baik	1.000	Baik
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah perangkat daerah yang dilaksanakan	100	1 Dokumen	10	1 Dokumen	65	1 Dokumen	65	1 Dokumen	65	1 Dokumen	65	1 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	5	1 Dokumen	5	1 Dokumen	5	1 Dokumen	5	1 Dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Periode pengamanan Barang Milik Daerah dilakukan pengamanan	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Periode koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Periode pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD pengendalian	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Periode Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD	2 Semester	2 Semester	0	2 Semester	10	2 Semester	10	2 Semester	10	2 Semester	10	2 Semester
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Periode Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Triwulan	4 Triwulan	0	4 Triwulan	10	4 Triwulan	10	4 Triwulan	10	4 Triwulan	10	4 Triwulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian	100	100	0	100	605	100	605	100	605	100	605	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	100 Stel	100	0	100 stel	65	100 stel	65	100 stel	65	100 stel	65	100 stel
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Periode Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai fungsi dan tugas	0 orang	0 orang	0	20 orang	100	20 orang	100	20 orang	100	20 orang	100	20 orang

Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0 orang	0	20 orang	100	20 orang	100	20 orang	100	20 orang	100	20 orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan	0 orang	0 orang	0	20 orang	100	20 orang	100	20 orang	100	20 orang	100	20 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	100	0	100	793	100	793	100	793	100	793	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	12	1 paket	13	1 paket	13	1 paket	13	1 paket	13	1 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	95	12 Bulan	96	12 Bulan	96	12 Bulan	96	12 Bulan	96	12 Bulan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	197	1 Paket	197	1 Paket	197	1 Paket	197	1 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peserta rapat/tamu dan lainnya	850 Orang	850 Orang	13	850 Orang	20	850 Orang	20	850 Orang	20	850 Orang	20	850 Orang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	90 Jenis	90 Jenis	20	90 Jenis	30	90 Jenis	30	90 Jenis	30	90 Jenis	30	90 Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	85 orang	85 orang	0	85 orang	15	85 orang	15	85 orang	15	85 orang	15	85 orang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Periode Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	191	12 Bulan	350	12 Bulan	350	12 Bulan	350	12 Bulan	350	12 Bulan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Periode penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Periode Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	252 Unit	0 Unit	0	51 Unit	1.380							
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit	0 Unit	0									
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	10 Unit	0 Unit	0	1 Unit	600							
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel diadakan	151 Unit	0 Unit	0	20 Unit	30							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	90 Unit	0 Unit	0	30 Unit	450							
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 Unit	0 Unit	0									
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	300							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	0 Unit	0 Unit	0									
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	100	287.5	100	385	100	385	100	385	100	385	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode pelaksanaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	3.5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan	5	12 Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia	12 Bulan	12 Bulan	119	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	4 Triwulan	4 Triwulan	0	4 Triwulan	30	4 Triwulan	30	4 Triwulan	30	4 Triwulan	30	4 Triwulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	165	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100	100	412	100	630	100	630	100	630	100	630	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Periode Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	269	12 Bulan	300	12 Bulan	300	12 Bulan	300	12 Bulan	300	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Periode Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	128	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Periode pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Periode pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Triwulan	4 Triwulan	15	4 Triwulan	80	4 Triwulan	80	4 Triwulan	80	4 Triwulan	80	4 Triwulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Periode pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Triwulan	4 Triwulan	0	4 Triwulan	50	4 Triwulan	50	4 Triwulan	50	4 Triwulan	50	4 Triwulan
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,08	61,13	61,18	1.100.00 0.000	61,23	1.200.00 0.000	61,28	1.350.00 0.000	61,33	1.350.00 0.000	61,38	1.350.00 0.000

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunisa usaha kewenangan provinsi	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	700	11 kab/kota	700	11 kab/kota	800	11 kab/kota	850	11 kab/kota	850	11 kab/kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 organisasi	350	11 organisasi	350	11 organisasi	350	11 organisasi	350	11 organisasi	350
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	11 kab/kota	11 kab/kota	11 Kab/Kota	2300	11 Kab/Kota	2300	11 Kab/Kota	2300	11 Kab/Kota	2300	11 Kab/Kota	2300
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	150 orang	150 orang	150 orang	800	150 orang	800	150 orang	800	150 orang	800	150 orang	800
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Dokumen	150	11 Dokumen	150	11 Dokumen	150	11 Dokumen	150	11 Dokumen	150

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1050	11 Dokumen	1050	11 Dokumen	1050	11 Dokumen	1050	11 Dokumen	1050
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	51,17	52,6	54,8	5,125,000,000	55,35	5,210,000,000	55,8	5,301,000,000	56,46	5,398,600,000	56,75	5,503,460,000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Pemerintah Kewenangan provinsi yang melaksanakan Pengarusutamaan gender (PUG) yang harus ditingkatkan	70%	70%	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	150	11 dokumen	150	11 dokumen	150	11 dokumen	150	11 dokumen	150
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1	1	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi	43	43	43	150	43	150	43	150	43	150	43	150

Pelaksanaan PUG termasuk PPRG KewenanganProvinsi	Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi												
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	25	25	43	150	43	150	43	150	43	150	43	150
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Partisipasi perempuan Bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30%	30%	30%	1.100	30%	1.100	30%	1.100	30%	1.100	30%	1.100
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	550	1 dokume n	550	1 dokume n	550	1 dokume n	550	1 dokume n	550
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	11 organisa si	11 organisa si	11 organisa si	550	11 organisa si	550	11 organisa si	550	11 organisa si	550	11 organisa si	550
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Persentase Pemberian penguatan dan pengembangan kepada	70%	70%	100%	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%	600

Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi												
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	300	1 lembaga	300	1 lembaga	300	1 lembaga	300	1 lembaga	300
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar /Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	50 orang	50 orang	75 orang	750	75 orang	750	75 orang	750	75 orang	750	75 orang	750
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100	100	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen data gender dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200

dalam Kelembagaan DataProvinsi	Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi												
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standard	-	100%	100%	1,325,00 0,000	100%	1,325,00 0,000	100%	1,325,00 0,000	100%	1,525,00 0,000	100%	1,525,00 0,000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pendampingan dan advokasi dlm upaya peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	1.075	11 Kab/Kota	1.075	11 Kab/Kota	1.075	11 Kab/Kota	1.075	11 Kab/Kota	1.075
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	11 OPD	11 OPD	11 OPD	150	11 OPD	150	11 OPD	150	11 OPD	150	11 OPD	150
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	11 laporan	11 laporan	11 laporan	825	11 laporan	825	11 laporan	825	11 laporan	825	11 laporan	825
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi yang diperkuat dan ditingkatkan	100%	100%	950	100%	950	100%	950	100%	950	100%	950	100%

KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi													
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	11 lembaga	11 lembaga	11 lembaga	150	11 lembaga	150	11 lembaga	150	11 lembaga	150	11 lembaga	150
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	11 lembaga penyedia layanan	11 lembaga penyedia layanan	11 lembaga penyedia layanan	825	11 lembaga penyedia layanan	825	11 lembaga penyedia layanan	825	11 lembaga penyedia layanan	825	11 lembaga penyedia layanan	825
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	125	1 dokumen	125	1 dokumen	125	1 dokumen	125	1 dokumen	125
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang diberikan layanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	220 KK	220 KK	220 KK	300	220 KK	300	220 KK	300	220 KK	300	220 KK	300
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 sistem layanan komprehensif	1 sistem layanan komprehensif	1 sistem layanan komprehensif	300	1 sistem layanan komprehensif	300	1 sistem layanan komprehensif	300	1 sistem layanan komprehensif	300	1 sistem layanan komprehensif	300

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	300,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	750,000,000	100%	900,000,000
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/kota yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	500	11 Kab/Kota	500	11 Kab/Kota	500	11 Kab/Kota	500	11 Kab/Kota	500
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	11 organisasi	11 organisasi	11 organisasi	250	11 organisasi	250	11 organisasi	250	11 organisasi	250	11 organisasi	250
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi yang tersedia	100%	100%	100%	950	100%	950	100%	950	100%	950	100%	950
Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	50 org	50 org	50 org	300	50 org	300	50 org	300	50 org	300	50 org	300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan	11 Pelayan	11 Pelayan	11 Pelayan	250	11 Pelayan	250	11 Pelayan	250	11 Pelayan	250	11 Pelayan	250

Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi												
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	150	11 Dokumen	150	11 Dokumen	150	11 Dokumen	150	11 Dokumen	150
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	700	100%	700	100%	700	100%	700	100%	700
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200	1 Laporan	200	1 Laporan	200	1 Laporan	200	1 Laporan	200
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250	11 Dokumen	250
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	2,725,00 0,000,	100	2,725,00 0,000,	100	2,725,00 0,000,	100	2,725,00 0,000,	100	2,725,00 0,000,
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Advokasi Terhadap Para Pihak Lingkup provinsi dan lintas kab/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%	100%	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	150	11 dokumen	150	11 dokumen	150	11 dokumen	150	11 dokumen	150
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan	11 OPD	11 OPD	11 OPD	150	11 OPD	150	11 OPD	150	11 OPD	150	11 OPD	150

Perempuan Kewenangan Provinsi	Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi												
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	100%	100%	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450	100%	450
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	100	50 orang	100	50 orang	100	50 orang	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	11 layanan	11 layanan	11 layanan	300	11 layanan	300	11 layanan	300	11 layanan	300	11 layanan	300
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase pengembangan dan penguatan sumber daya pengelola serta penyediaan layanan perlindungan khusus perempuan pada lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	100%	100%	100%	475	100%	475	100%	475	100%	475	100%	475
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100	11 laporan	100	11 laporan	100	11 laporan	100	11 laporan	100

Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kekerasan Kewenangan Provinsi												
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	175	1 lembaga	175	1 lembaga	175	1 lembaga	175	1 lembaga	175
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 org	50 org	50 org	100	50 org	100	50 org	100	50 org	100	50 org	100
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100	11 dokumen	100	11 dokumen	100	11 dokumen	100	11 dokumen	100
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparat desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	72.66	72.66	94.55	350	94.55	350	94.55	350	94.55	350	94.55	350
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	persentase yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60%	60%	100%	17.700	100%	17.700	100%	17.700	100%	17.700	100%	17.700
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500

Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	750	1 dokume n	750	1 dokume n	750	1 dokume n	750	1 dokume n	750
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	750	1 dokume n	750	1 dokume n	750	1 dokume n	750	1 dokume n	750
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	50 org	50 org	50 org	500	50 org	500	50 org	500	50 org	500	50 org	500
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1.000	1 dokume n	1.000	1 dokume n	1.000	1 dokume n	1.000	1 dokume n	1.000
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1.000	1 dokume n	1.000	1 dokume n	1.000	1 dokume n	1.000	1 dokume n	1.000
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650	1 dokume n	650
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Tekni	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1.600	1 dokume n	1.600	1 dokume n	1.600	1 dokume n	1.600	1 dokume n	1.600

BantuanPendampingan dan Bantuan Teknis													
Pelaksanaan Penugasan/Urusan/KewenanganProvinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	650	1 dokumen	650	1 dokumen	650	1 dokumen	650	1 dokumen	650
Pembinaan dan Pengawasan atas PenetapanRancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten/Kota dalam PembiayaanDesa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota danLembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.400	1 dokumen	2.400	1 dokumen	2.400	1 dokumen	2.400	1 dokumen	2.400
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	650	1 dokumen	650	1 dokumen	650	1 dokumen	650	1 dokumen	650
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	750	1 dokumen	750	1 dokumen	750	1 dokumen	750	1 dokumen	750
Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasimengenai Pemerintahan Desa diKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	950	1 dokumen	950	1 dokumen	950	1 dokumen	950	1 dokumen	950
Fasilitasi Peran BPD dalam PenyelenggaraanPemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	950	1 dokumen	950	1 dokumen	950	1 dokumen	950	1 dokumen	950
Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500

Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500
Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	100	100	100	2,550,00 0,000	100	2,650,00 0,000	100	2,650,00 0,000	100	2,950,00 0,000	100	3,300,00 0,000
	2. persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	72,66	78,13	83,61		89,08		94,55		100		100	
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang ditingkatkan fungsi, tugas dan perannya dalam pelebagaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota	11 Kab/kota	11 Kab/kota	11 kab/kota		11 kab/kota		11 kab/kota		11 kab/kota		11 kab/kota	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	700	1 dokume n	700	1 dokume n	700	1 dokume n	700	1 dokume n	700
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	176	1 dokume n	176	1 dokume n	176	1 dokume n	176	1 dokume n	176

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	300	11 Lembaga	300	11 Lembaga	300	11 Lembaga	300	11 Lembaga	300
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	11 sarana prasarana	11 sarana prasarana	11 sarana prasarana	176	11 sarana prasarana	176	11 sarana prasarana	176	11 sarana prasarana	176	11 sarana prasarana	176
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	176	1 dokumen	176	1 dokumen	176	1 dokumen	176	1 dokumen	176

Perlindungan Masyarakat Desa	Perlindungan Masyarakat Desa												
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1600	1 dokumen	1600	1 dokumen	1600	1 dokumen	1600	1 dokumen	1600
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persentase kab/kota yang ditingkatkan fungsi, tugas dan perannya dalam pelebagaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota	57,89%	57,89%	70%	1.900	70%	1.900	70%	1.900	70%	1.900	70%	1.900
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.900	1 dokumen	1.900	1 dokumen	1.900	1 dokumen	1.900	1 dokumen	1.900
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta	Jumlah kab/kota yang ditingkatkan fungsi, tugas dan perannya dalam pelebagaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat dan	10 Kab/kota	10 Kab/kota	10 kab/kota	500	10 kab/kota	500	10 kab/kota	500	10 kab/kota	500	10 kab/kota	500

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	masyarakat hukum adat tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota												
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis Digital	14%	25%	45	1,050,00 0,000	65	1,075,00 0,000	85	1,100,00 0,000	100	1,175,00 0,00	100	1,200,00 0,000
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase Fasilitasi dalam Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	90%	90%	90%	3950	90%	3950	90%	3950	90%	3950	90%	3950
Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.
Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.	1 dokume n	1.150.
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah an Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa yang diadakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	500	10 Paket	500	10 Paket	500	10 Paket	500	10 Paket	500

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	66,96	79,99	84,94	750,000, 000,	89,96	750,000, 000,	94,98	750,000, 000,	100	750,000, 000,	100	750,000, 000,
Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	40%	40%	80%	1.000	80%	1.000	80%	1.000	80%	1.000	80%	1.000
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500	1 dokume n	500
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Angka)	63,66	65,36	67,06	300,000, 000,	68,76	325,000, 000	70,46	350,000, 000	72,16	375,000, 000,	74	400,000, 000
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1650	1 dokume n	1650	1 dokume n	1650	1 dokume n	1650	1 dokume n	1650
Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Unit Hasil Pengembangan <i>Prototype</i> Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	1 prototyp e	1 prototyp e	1 prototyp e	200	1 prototyp e	200	1 prototyp e	200	1 prototyp e	200	1 prototyp e	200

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	50 org	50 org	50 org	150	50 org	150	50 org	150	50 org	150	50 org	150
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	150	1 dokume n	150	1 dokume n	150	1 dokume n	150	1 dokume n	150
Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	1 organisa si	1 organisa si	1 organisa si	200	1 organisa si	200	1 organisa si	200	1 organisa si	200	1 organisa si	200
Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) di Kampung KB	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150

Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga Indeks Pembangunan Keluarga	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	200	1 Dokume n	200	1 Dokume n	200	1 Dokume n	200	1 Dokume n	200
Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	150	1 Dokume n	150	1 Dokume n	150	1 Dokume n	150	1 Dokume n	150
Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan,	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan fungsi, tugas, peran dan keikutsertaannya dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	100%	1325	100%	1325	100%	1325	100%	1325	100%	1325

Kesejahteraan Keluarga													
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 laporn	1 laporn	1 laporn	275	1 laporn	275	1 laporn	275	1 laporn	275	1 laporn	275
Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 laporn	1 laporn	1 laporn	250	1 laporn	250	1 laporn	250	1 laporn	250	1 laporn	250
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300
Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250	11 dokumen	250
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	63	67	67	800,000,000	67	850,000,000	67	1,125,000,000	70	1,150,000,000	70	1,175,000,000

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kab/kota yang mengembangkan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	11 kab/kota	11 kab/kota	11 kab/kota	800	11 kab/kota	800	11 kab/kota	800	11 kab/kota	800	11 kab/kota	800
Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	11 laporan	11 laporan	11	175	11	175	11	175	11	175	11	175
Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 modul ajar/dokumen	1 modul ajar/dokumen	1	125	1	125	1	125	1	125	1	125
Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 laporan	1 laporan	1 laporan	250	1 laporan	250	1 laporan	250	1 laporan	250	1 laporan	250

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	200	11 dokume n	200	11 dokume n	200	11 dokume n	200	11 dokume n	200
Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 modul/d okumen	1 modul/d okumen	150	1 Modul/d okumen	150	1 Modul/d okumen	150	1 Modul/d okumen	150	1 Modul/d okumen	150	1 Modul/d okumen
Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 laporan	1 laporan	1 laporan	250	1 laporan	250	1 laporan	250	1 laporan	250	1 laporan	250

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Samadengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	200	11 dokume n	200	11 dokume n	200	11 dokume n	200	11 dokume n	200
Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150	11 dokume n	150
Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosidan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan BudayaLokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokume n	1 dokume n	1 Modul/d okumen	150	1 Modul/d okumen	150	1 Modul/d okumen	150	1 Modul/d okumen	150	1 Modul/d okumen	150
Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	800	11 dokume n	800	11 dokume n	800	11 dokume n	800	11 dokume n	800
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahProvinsi dalam Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang diberdayakan dan ditingkatkan partisipasinya	11 ormas	11 ormas	11	700	11	700	11	700	11	700	11	700

dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	11 dokume n	11 dokume n	11 dokume n	800	11 dokume n	800	11 dokume n	800	11 dokume n	800	11 dokume n	800
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Org Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	11 ormas	11 ormas	11 ormas	200	11 ormas	200	11 ormas	200	11 ormas	200	11 ormas	200
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	11 organisa si	11 organisa si	11 organisa si	200	11 organisa si	200	11 organisa si	200	11 organisa si	200	11 organisa si	200
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19	22.4	22.1	22	600,000, 000	21.9	600,000, 000	21.8	600,000, 000	21.8	600,000, 000	21,76	600,000, 000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kab/kota dalam pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	11 kab/kota	11 kab/kota	11 kab/kota	3150	11 kab/kota	3150	11 kab/kota	3150	11 kab/kota	3150	11 kab/kota	3150

Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	11 dokumen	11 dokumen	11 Dokumen	200	11 Dokumen	200	11 Dokumen	200	11 Dokumen	200	11 Dokumen	200
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300	1 Dokumen	300
Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 laporan	1 laporan	1 laporan	200	1 laporan	200	1 laporan	200	1 laporan	200	1 laporan	200
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	350	11 dokumen	350	11 dokumen	350	11 dokumen	350	11 dokumen	350
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	1 Modul/dokumen	1 Modul/dokumen	1 Modul/dokumen	300	1 Modul/dokumen	300	1 Modul/dokumen	300	1 Modul/dokumen	300	1 Modul/dokumen	300
Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	11 laporan	11 laporan	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300

Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal													
Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	11 laporan	11 laporan	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	11 laporan	11 laporan	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	11 kajian	11 kajian	11 kajian	300	11 kajian	300	11 kajian	300	11 kajian	300	11 kajian	300
Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300

Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	kepada Pemangku Kepentingan												
Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2100	1 dokumen	2100	1 dokumen	2100	1 dokumen	2100	1 dokumen	2100
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300
Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300
Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300

dan Pembangunan Keluarga	Berencana dan Pembangunan Keluarga												
Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300
Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan Early Warning System/ Peringatan Dini	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	11 kab/kota	11 kab/kota	11 kab/kota	300	11 kab/kota	300	11 kab/kota	300	11 kab/kota	300	11 kab/kota	300
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300
Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA PD

NO	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.526	0.5	0.475	0.45	0.425	0.4	0.4
	Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender	Indeks	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	70	70.5	71	71.5	72	72.5	72.5
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Indeks	1.65	1.75	1.85	1.95	2	2.1	2.1
	Jumlah Desa Mandiri	jumlah	400	410	415	420	422	425	425
	Nilai SAKIP	nilai	75	80	80	80	85	88	88
	IKM (Indeks kepuasan Masyarakat)	indeks	75	80	80	80	85	88	88

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.526	0.5	0.475	0.45	0.425	0.4	0.4
	Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender	Indeks	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84

	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Persentase	60	60	70	80	85	90	
	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase							
	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase	79.99	84.94	89.96	94.98	100	100	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	78.13	83.61	89.08	94.53	100	100	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	rata rata	22.1	22	21.9	21.8	21.8	21.76	
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	rata rata	63	66.74	67	68	69	70	8.4
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	10.2	9.6	9.4	8.9	8.5	8.5	

	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	rata rata	22.1	22	21.9	21.8	21.8	21.76	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	65.36	67.06	68.76	70.46	72.16	74	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja daerah dapat dilihat melalui 3 (tiga) bidang yaitu 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan 3) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Setiap bidang memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan

a. Indeks Pembangunan Gender;

IPG Provinsi Jambi di tahun 2021 mencapai 88,44 dengan target pencapaian akhir tahun 2026 sebesar 91,50

b. Indeks Pemberdayaan Gender;

IDG Provinsi Jambi di tahun 2021 mencapai 67,78 dengan target pencapaian akhir tahun 2026 sebesar 73

c. Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan

- d. Persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif
- e. Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak
- 2. Bidang Masyarakat dan Desa
 - a. Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar
 - b. Persentase peningkatan pelaksanaan kerjasama desa
 - c. Persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa
 - d. Persentase Bumdes yang aktif
 - e. Persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG
 - f. Persentase kawasan perdesaan yang terbentuk
- 3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
 - b. Persentase PUS Anggota POKTAN yang ber KB (BKB, BKR, BKL);
 - c. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR);
 - d. Angka Kelahiran Total (TFR 15 -49 Tahun);
 - e. Angka Kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 Tahun);
 - f. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 Tahun).

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021 - 2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,526	0.5	0.475	0.45	0.425	0.4	0.4
2	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	NA	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Indeks Perlindungan Anak	NA	66,26	66,26	67	67,62	69,87	70	70
1	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	%	40 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80 %
3	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	60 %	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
5	Jumlah Desa Mandiri	jumlah desa	83	127	134	141	148	155	163
6	Jumlah Desa Berkembang	jumlah desa	875	849	807	767	731	694	659
7	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa	154	87	84	80	76	72	68

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2026	2027	2028	2029	2030	
8	Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	Indeks	10	10	30	40	50	50	50
9	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Berkembang	Jumlah BUMDes	80	100	115	120	130	130	130
10	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	Jumlah BUMDes	0	0	4	6	10	12	12
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,72 %	1,72 %	1,70 %	1,68 %	1,65 %	1,62 %	1,62 %
2	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	%	60,3 %	60,3 %	65,44 %	65,48 %	65,5 %	65,52 %	65,57 %
3	Indeks pembangunan Keluarga	NA	51,11	51,11	60,32	60,35	60,39	60,45	60,50

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk lingkungan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2021 - 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021 -2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan

Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.